

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskriptif Teori

1. Hakekat Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja menurut Lorens Bagus adalah segala kegiatan yang terus dilakukan dengan berjalannya waktu secara kontinyu. Dengan menyatakan bahwa : tekanan lebih pada soal waktu. Jadi menurut pendapat ini ruang berarti tempat dimana ia bekerja menjalankan aktivitas praktiknya dan waktu berarti berapa lama ia menjalankan aktivitas tersebut.

John Lock mengemukakan bahwa perkembangan individu akan di tentukan oleh pengalaman yang diperoleh selama perkembangan individu itu, dalam pengertian pengalaman termasuk juga pendidikan yang diterima individu yang bersangkutan¹.

Menurut Bedjo Siswanto pengalaman sangat berhubungan dengan masa kerja karena kenyataan menunjukkan adanya kecenderungan makin lama bekerja makin banyak pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja yang bersangkutan sebaliknya singkat masa kerja makin sedikit pengalaman yang diperoleh juga semakin sedikit².

¹ John Lock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta, PT.Gramedia pustaka utama, 1999),h.203

² Bedjo Siswanto, *Ancangan Dalam Penyalahgunaan dan Pengembangan Unsur Tenaga Kerja* (bandung : Angkasa, 2000), h.90

Pengalaman kerja menurut W.J.S Purwadarminta adalah sesuatu yang dirasakan³. Dan menurut S. Nasution pengalaman merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mengandung arti bagi individu itu sendiri⁴.

Selain itu, pengalaman merupakan pengetahuan atau kemampuan yang diperoleh dari praktek atau usaha belajar⁵. Kemudian pengalaman kerja dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi dalam organisme dalam sesuatu saat termasuk proses psikologi, kesan-kesan sensorik, aktifitas-aktifitas motorik, dan kognitif⁶. Sedangkan organisme itu sendiri adalah totalitas individu yang memiliki sifat-sifat yang bereaksi secara keseluruhan terhadap seluruh pengalaman untuk memenuhi motif dasar untuk mengaktualisasikan, mempertahankan, dan pengembangan diri.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas saya meninjau pengalaman kerja dari sudut masa kerja guru karena yang membuat seseorang mendapatkan banyak pengalaman atau tidak adalah masa kerja guru tersebut dalam menjalankan profesinya.

Bagi pegawai negeri sipil pengertian masa kerja adalah “lamanya seseorang menjabat sebagai pegawai negeri sipil terhitung sejak ia pengangkatan

³ W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976) h.28

⁴ S. Nasution, *Didaktik Azas-azas Mengajar*, (Bandung : Jemars,1982) h.101

⁵ C.P. Chaplin penerjemah Kartini Kartono, *Kamus Psikologi* (Jakarta : Rajawali Pers,1990) h.179

⁶ Sumadi,Suryadibrata, *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta : Rajawali Pers,1982) h.305

pertamanya⁷. Pengalaman kerja dapat diperoleh bila seseorang sudah bekerja atau menekuni profesinya dalam jangka waktu yang relatif lama.

Keuntungan mempunyai masa kerja yang lama adalah:

1. Semakin mengenal situasi dan kondisi lingkungan kerjanya.
2. Semakin mengenal berbagai karakteristik murid.
3. Meningkatkan kerja sama yang lebih baik di antara sesama rekan kerja.
4. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan mengajar.
5. Meningkatkan motivasi kerja.
6. Meningkatkan pangkat/gaji sehingga mengangkat prestise guru.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segi masa kerja dapat mempengaruhi tingkat kemampuan dan keterampilan guru. Masa kerja juga memberi pengaruh untuk mengetahui apakah guru mencintai dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi terhadap tugas keguruannya.

2. Hakekat Kompetensi

Menurut kamus umum kompetensi adalah “kewenangan atau hak untuk menentukan atau memutuskan sesuatu⁸. Pengertian yang tercantum dalam definisi tersebut adalah bahwa kompetensi merupakan hak seseorang untuk mengambil keputusan terhadap hal yang merupakan wewenangnya. Di samping itu kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan

⁷ H.Naingolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta : Pt.Pertja, 1985) h.99

⁸ Badudu, Sutan mohammad zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : pustaka sinar harapan)

sesuatu yang sesuai dengan pekerjaan dan keahliannya sejalan dengan itu Roestinah menyebutkan “kompetensi sebagai tugas yang memadai atau pemilihan pengetahuan keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang⁹ jadi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengertian kompetensi sebagai kemampuan untuk melakukan profesinya.

Seperti dokter yang memeriksa pasiennya sudah tentulah seorang dokter tersebut punya kemampuan untuk memeriksa atau mendiagnosa pasien tersebut terjangkit penyakit apa. Begitu pula dengan guru yang mempunyai kompetensi.

3. Hakekat guru

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, guru diartikan “sebagai orang yang mengajar orang lain baik di sekolah atau bukan tentang suatu ilmu pengetahuan dan keterampilan¹⁰. Syah mengutip pendapat Mc Leod(1989) yang mengartikan guru sebagai berikut : “ A Person Whose Occupation is Teaching Others¹¹. Artinya guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain. Pada prinsipnya mengajar orang lain (siswa) belajar. Kegiatan yang dilakukan oleh guru tidak hanya berorientasi pada kecakapan berdimensi pemikiran tetapi juga pada perasaan dan karsa.

⁹ Roestiyah N.K, *Masalah Ilmu-ilmu Keguruan*, (Jakarta :Bina Aksara, 1986) h.4

¹⁰ Badudu, Sutan mohammad zain, Op. Cit h.478

¹¹ Muhibbin Syah, *Psikologi pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung :Remaja Rosdakarya 1997), h.222

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa guru bukan hanya mengajar di sekolah, tetapi juga di tempat atau lembaga lain tetapi dalam pembahasan ini guru dibatasi dalam orang yang mengajar di sekolah.

4. Hakekat Kompetensi guru

Menurut UU No.14 tahun 2005 kompetensi guru dibagi menjadi 4 bagian yaitu, sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan **kompetensi pedagogik** adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
2. Yang dimaksud dengan **kompetensi kepribadian** adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
3. Yang dimaksud dengan **kompetensi profesional** adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
4. Yang dimaksud dengan **kompetensi sosial** adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar¹².

Wijaya dalam buku Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar-mengajar (1994:25) menuliskan bahwa kompetensi profesional guru terdiri dari sepuluh kemampuan, yaitu :

¹²Undang-undang No.14 tahun 2003 (*wisiklopedia* Internet)

Kemampuan menguasai landasan pendidikan, kemampuan menguasai bahan atau materi pelajaran, kemampuan mengelola kelas, kemampuan mengelola interaksi belajar- mengajar, kemampuan menggunakan media dan sumber belajar kemampuan menilai prestasi siswa, kemampuan memahami prinsip-prinsip dan penafsiran hasil penelitian untuk keperluan pengajaran, kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, dan kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah¹³.

Jadi menurut kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat ini pemerintah Indonesia mengatur empat kompetensi yang harus di penuhi oleh seorang tenaga pengajar tetapi dalam pembahasan ini wijaya membahas bahwa ada sepuluh kemampuan guru yang bisa dijadikan tolak ukur untuk penilaian.

5. Hakekat Profesionalisme

Profesionalisme adalah paham atau sikap yang menghendaki agar suatu pekerjaan dilaksanakan dan dikelola dengan cara-cara yang profesional (mensyaratkan adanya keahlian dan keterampilan tertentu, imbalan wajar¹⁴).

Profesionalisme itu bukan sekedar pekerjaan biasa, yang dengan mudah bisa ditinggalkan seseorang atau dijauhan karena ketidakcocokannya dengan hatinya, atau yang dapat dikhianati tetapi dengan profesionalisme, seseorang akan memiliki keterikatan lebih dalam dengan pekerjaannya. Seseorang dengan sadar dan akan tetap setia melaksanakan profesinya karena rasa tanggung-jawab pada profesi tersebut.

¹³ Wijaya, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar* (Jakarta : 1994), h.25

¹⁴ Agustiar syah Nur, *Professional Dan Pengembangan Staf* (Jakarta : Grafindo Persada) h 14

Berikut adalah 6 (enam) kriteria profesi di bidang pendidikan, yang dikutip Roestiyah N.K, yaitu:

1. Berbeda dengan pekerjaan lain, karena memiliki sejumlah pengetahuan yang harus dikuasai dan dipraktekkan oleh para anggotanya.
2. Memiliki suatu ikatan yang kuat terdiri dari para anggotanya yang aktif mengatur syarat-syarat memasuki profesinya.
3. Memiliki kode etik yang dapat memaksa.
4. Memiliki litelatur sendiri, walaupun ia mungkin menimba ilmu dari banyak disiplin akademis.
5. Memperoleh pengakuan dari masyarakat bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan profesional¹⁵.

6. Hakekat Mata Pelajaran PKn

Pendidikan kewarganegaraan atau PKn merupakan bidang studi yang bersifat Multifacet dengan konteks lintas bidang keilmuan. Namun secara filsafat keilmuan PKn mempunyai ontology pokok ilmu politik khususnya konsep “political democracy” untuk aspek “duties and rights of citizen”(Chreshore:1886).

Dari ontology pokok inilah berkembang konsep “civic”, yang secara harfiah diambil dari bahasa latin “civicus” yang artinya warga negara pada zamanyunani kuno, kemudian diakui secara akademis sebagai embrio “civic education”.

¹⁵ Roestiyah N.K, *Masalah Ilmu-ilmu Keguruan*, (Jakarta :Bina Aksara, 1986) h.30

Selanjutnya di Indonesia diadaptasi menjadi “pendidikan kewarganegaraan” (PKn). Secara etimologis, Pkn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu dari lima tradisi “social studies” yakni “citizenship transmission”¹⁶. Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan dalam kurikulum 2004 disebut juga sebagai mata pelajaran kewarganegaraan (citizenship).

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) adalah wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia sehingga diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk tingkah laku di kehidupan sehari-hari sebagai individu, anggota masyarakat, warganegara dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸

Menurut KBK 2004 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi

¹⁶ Saripudin, Udin *makalah Profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan*, h 8

¹⁷ *Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) Sekolah Menengah Umum* (Jakarta: Puskur, 2001)h 10

¹⁸ UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.¹⁹

Sedangkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang akan disampaikan kepada peserta didik sebagai berikut :

- A. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- B. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- C. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa –bangsa lainnya.²⁰

Berpijak pada tujuan dari pembelajaran PKn, maka secara substansial mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari:

1. Aspek pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi serta pemilu, sistem politik yang terdiri atas lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional(ideologi dan karakteristik nasional), pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik.
2. Aspek keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya: berperan

¹⁹ Kurikulum 2004, Jakarta: Diknas

²⁰ *Ibid*

serta aktif mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerja sama, dan mengelola konflik.

3. Aspek nilai-nilai kewarganegaraan (*civics values*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas.²¹

B. Kerangka Berpikir

Guru merupakan tenaga pengajar khusus yang bertugas mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada siswa yang diajarnya pada hakekatnya guru harus mempunyai kompetensi yang cukup untuk mengajar siswa, karena guru merupakan peran yang sangat vital bagi perkembangan siswa itu sendiri.

Karena dari guru lah siswa dapat mengetahui apa yang mereka ingin tahu, guru yang merupakan tenaga pendidik khusus ini merupakan profesi yang didapat dengan kerja keras dan profesionalitas yang tinggi serta yang tidak kalah pentingnya masa kerja, dengan masa kerja yang lama guru tersebut akan mendapatkan pengalaman kerja yang banyak.

²¹ BNSP, "JUKNIS Penyusunan Silabus", Jakarta Tahun 2007

Lewat pengalaman kerja inilah guru dapat mengembangkan kemampuannya dalam menyampaikan materi sesuai dengan bidang studi yang diajarkan karena mungkin saja kemampuan menguasai materi secara luas tidak dapat dikembangkan secara maksimal oleh para guru walaupun guru tersebut mempunyai masa kerja yang lama, peneliti meneliti apakah ada hubungan antara pengalaman kerja yang di tinjau dari masa kerja guru tersebut dengan kompetensi profesional guru tersebut, pembatasannya hanya pada guru PKn.

C. Pengajuan Hipotesis

Berdasarkan deskripsi teoritik dan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah “ Adanya hubungan antara pengalaman kerja terhadap kompetensi profesional .